



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 171 /A.3/B.2/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Jakarta, 22 MAR 2021

Kepada yang terhormat:
(daftar terlampir)
di tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan BKPM oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat "hybrid" sebagai berikut :

Hari/tanggal : Selasa, 23 Maret 2021

Jam : 08.00-18.00 WIB

Tempat : 1. Tatap Muka di Ballroom 1 Hotel Fairmont
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta
(Disediakan SWAB Antigen di Business Center Meeting Room 1,
Lantai 2, mulai pukul 07.00 WIB)

2. Tatap Maya melalui

Zoom:

<https://zoom.us/j/2983588124?pwd=SmZ4Ymx4N1VCQk5CNFFzOFVxRWd3dz09>

Meeting ID: 298 358 8124

Passcode: BKPM

Agenda :

1.	08.00-10.00 WIB	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BKPM tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.	10.15-13.15 WIB	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
3.	14.00-17.00 WIB	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Mengingat pentingnya rapat dimaksud, kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta rapat.

Demikian, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Kepala BKPM.

Lampiran I

Nomor : 171/A.3 /B.2/2021

Tanggal : 22 Maret 2021

Daftar Hadir

I. Pukul: 08.00-10.00 WIB Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BKPM tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Kepada Yth:

1. Tim Harmonisasi Bidang V Perekonomian, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Dr. Nasruddin, S.H., Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Ir. Lestari Indah, M.M Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Elen Setiadi, S.H., MSE, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
6. Santun Maspari Siregar, S.H., M.H., Direktur Hukum Perdata, Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., Direktur Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri;
8. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara
9. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
10. Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
12. Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
14. Sekretaris Utama, BKPM;
15. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM;
16. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM;
17. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
18. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, BKPM;
19. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
20. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem, BKPM;
21. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, BKPM;
22. Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi, BKPM;
23. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi, BKPM;
24. Kepala Pusat Bantuan Hukum, BKPM;
25. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan TU Pimpinan, BKPM.

II. Pukul 10.15-13.15 WIB Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Kepada Yth:

1. Tim Harmonisasi Bidang V Perekonomian, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Dr. Nasruddin, S.H., Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Ir. Lestari Indah, M.M Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Elen Setiadi, S.H., MSE, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
6. Santun Maspari Siregar, S.H., M.H., Direktur Perdata, Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
8. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara
9. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
10. Biro Hukum Badan Standarisasi Nasional;
11. Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Biro Hukum Kementerian Pertanian;
14. Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Biro Hukum Kementerian Perindustrian;
17. Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
18. Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
20. Biro Hukum Kementerian Kesehatan;
21. Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Biro Hukum Kementerian Pariwisata;
23. Biro Hukum Kementerian Agama;
24. Biro Hukum Kementerian Pertahanan;
25. Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
26. Biro Hukum Kementerian Keuangan;
27. Biro Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan;
28. Biro Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional;
29. Sekretaris Utama, BKPM;
30. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM;
31. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM;
32. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
33. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, BKPM;
34. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;

35. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem, BKPM;
36. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, BKPM;
37. Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi, BKPM;
38. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi, BKPM;
39. Kepala Pusat Bantuan Hukum, BKPM;
40. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan TU Pimpinan, BKPM.

III. Pukul 14.00-17.00 WIB Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kepada Yth:

1. Tim Harmonisasi Bidang V Perekonomian, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Dr. Nasruddin, S.H., Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Ir. Lestari Indah, M.M Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Elen Setiadi, S.H., MSE, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Satya Bhakti Parikesit, Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
6. Santun Maspari Siregar, S.H., M.H., Direktur Perdata, Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
8. Asisten Deputy Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara
9. Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
10. Biro Hukum Badan Standarisasi Nasional;
11. Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Biro Hukum Kementerian Pertanian;
14. Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Biro Hukum Kementerian Perindustrian;
17. Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
18. Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
20. Biro Hukum Kementerian Kesehatan;
21. Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Biro Hukum Kementerian Pariwisata;
23. Biro Hukum Kementerian Agama;
24. Biro Hukum Kementerian Pertahanan;
25. Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;
26. Biro Hukum Kementerian Keuangan;
27. Biro Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan;

28. Biro Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional;
29. Sekretaris Utama, BKPM;
30. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM;
31. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM;
32. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
33. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, BKPM;
34. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
35. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem, BKPM;
36. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, BKPM;
37. Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi, BKPM;
38. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi, BKPM;
39. Kepala Pusat Bantuan Hukum, BKPM;
40. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan TU Pimpinan, BKPM.